

# **PENGARUH PENGENDALIAN TERHADAP EFEKTIVITAS IZIN GANGGUAN DI KECAMATAN BOJONGSOANG KABUPATEN BANDUNG**

## ***EFFECT OF CONTROL ON THE EFFECTIVENESS OF DISORDER PERMITS IN BOJONGSOANG DISTRICT, BANDUNG DISTRICT***

**Rian Fatria Kurnia<sup>1</sup>, Rafih Sri Wulandari<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Langlangbuana

---

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatar belakangi dengan masalah belum optimalnya Penertiban Izin Gangguan di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung Masalah tersebut dihubungkan dengan salah satu variable Pengendalian yang diasumsikan dapat berpengaruh terhadap Efektivitas Penertiban Izin Gangguan .

Penelitian ini menggunakan teori pengendalian dari Hasibuan,( 2007: 245) dengan dimensi yang terdiri dari pengendalian langsung, pengendalian tidak langsung dan pengendalian berdasarkan kekecualian. Dan teori evektivitas dari Steers,(1985: 4-7) dengan dimensi yang terdiri dari optimasi tujuan, perspektif system dan tekanan perhatian pada perilaku manusia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey eksplanatif (*explanatory survai method*) sedangkan sumber pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan dengan teknik penelitian : angket, observasi, dan wawancara. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sampel random sederhana (*Simple Random Sampling*). Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah koefisienKorelasi Rank Spearman.

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa Pengaruh pengendalian terhadap efektivitas penertiban izin gangguan di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis penelitian dan hasil pengolahan data, didapatkan hasil nilai  $T_{hitung}$  sebesar 8,7391dibandingkan dengannilai  $T_{tabel}$ yaitu sebesar 2,0129, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima,, dengan demikian hipotesis yang diajukan teruji secara empirik.

**Kata Kunci:** Pengendalian, Efektivitas Dan Penertiban Izin Gangguan

### **ABSTRACT**

*This research is motivated by the problem of not yet optimal control of disturbance permits in the District of Bandung's Bojongsoang District. The problem is related to one of the Control variables assumed to affect the Effectiveness of Disruption Permit Control.*

*This study uses control theory from Hasibuan, (2007: 245) with dimensions consisting of direct control, indirect control and control based on exceptions. And the theory of effectiveness from Steers, (1985: 4-7) with dimensions consisting of optimizing goals, system perspective and attention pressure on human behavior.*

*The method used in this study is an explanatory survey method (explanatory survey method) while the source of data collection uses library research and field studies with research techniques: questionnaires, observations, and interviews. The sampling technique*

*used is a simple random sampling. The data analysis technique used is the Spearman Rank Correlation coefficient.*

*The results of this study show that the effect of control on the effectiveness of disruption permit control in Bojongsoang District, Bandung Regency is proven by the results of research hypotheses and data processing results, resulting in a Tcount of 8.7391 compared with the T table value of 2.0129, then Ho is rejected and Hi accepted, thus the proposed hypothesis is tested empirically.*

**Keywords:** *control, effectiveness and control of disturbance permits*

## 1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat, Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung telah diberi kewenangan untuk memberikan perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penyelenggaraan, pengawasan, penetapan serta pengumpulan data dan informasi, dan kewenangan lain yang dilimpahkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Dari sebagian urusan pilihan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat diantaranya urusan perizinan.

Berkaitan dengan urusan perizinan, urusan izin gangguan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bupati No 60 Tahun 2011 Kecamatan Bojongsoang diberi kewenangan untuk memberikan izin gangguan dengan batasan luas ruang usahaseluas 200 M<sup>2</sup> seperti tertuang pada Keputusan Bupati Nomor 8 Tahun 2004 yaitu Camat mengeluarkan Izin Gangguan dengan Skala Kecamatan 200 M<sup>2</sup>.

Dengan meningkatnya jumlah kegiatan usaha masyarakat di Kecamatan Bojongsoang, membawa pengaruh langsung terhadap kegiatan pembangunan usaha dari hari ke hari. Pemerintah Kecamatan Bojongsoang perlu menata

bagaimana proses pembangunan fisik dapat terkendali dan berlangsung secara efektif dan efisien. Hukum sebagai kaedah merupakan petunjuk hidup yang berupa perintah atau larangan yang mengatur tata tertib yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat. Masyarakat yang melanggar petunjuk tersebut dapat dikenakan suatu tindakan oleh pemerintah atau penguasa. Hubungan hukum dengan pembangunan sangat erat sekali, yaitu pembangunan tidak akan berjalan lancar apabila peraturan hukumnya tidak mendukung. Hal ini sejalan dengan pemikiran Mohammad Janin, yang menyatakan bahwa untuk menciptakan kegiatan pembangunan usaha yang sehat dan bertanggung jawab, tentunya harus ada kesadaran hukum dan setiap pelaku kegiatan usaha untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun dalam kenyataannya, berdasarkan peninjauan awal melalui observasi dilapangan, peneliti melihat bahwa urusan perizinan khususnya penertiban izin gangguan di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung belum optimal. Penertiban izin gangguan bagi pelaku usaha yang berada di wilayah Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung belum efektif, dimana dari

tahun 2013 s.d. 2015 Jumlah pelaku usaha yang melakukan pengurusan izin gangguan semakin menurun. Padahal dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan telah dijelaskan bahwa Izin Gangguan adalah merupakan pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja, kecuali tempat usaha/kegiatan yang lokasinya telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Indikasi-indikasi yang menunjukkan Belum optimalnya penertiban Izin Gangguan di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung antara lain :

1. Rendahnya kesadaran dari sebagian pemilik usaha untuk melaksanakan kewajibannya mengurus Izin Gangguan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Sebagian masyarakat pelaku usaha mengeluhkan lamanya jangka waktu dikeluarkannya izin tempat usaha
3. Kurangnya kejelasan prosedur dan mekanisme pembuat Izin Gangguan
4. Banyak pelaku usaha yang melakukan usaha dilahan yang bukan peruntukannya seperti : di lahan milik pemerintah seperti lahan PT. KAI, PDAM, PU Bina

Marga dan atau instansi-instansi lainnya

5. Kurang tegasnya aparat pemerintah dalam melaksanakan sanksi bagi subjek Pemilik Usaha yang belum membuat Izin Gangguan.
6. Kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang yang tidak memperpanjang Izin Gangguan.

Untuk menganalisis permasalahan di atas, peneliti mencoba menghubungkannya dengan variabel yang dimungkinkan mempengaruhinya yaitu Pengendalian. Dengan demikian kiranya cukup beralasan jika permasalahan yang timbul dikaji melalui analisis pengendalian. Karena berdasarkan teoritis pengendalian dalam prosesnya berupaya untuk mengawasi dan mencegah terjadinya penyimpangan – penyimpangan guna memperlancar kegiatan penertiban izin gangguan di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung agar dapat diperbaiki.

Alasan peneliti mengangkat masalah penertiban izin gangguan di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bupati No 11 tahun 2014 bahwa, perizinan merupakan salah satu aset dari pendapatan anggaran daerah, jadi sistem perizinan sangatlah penting bagi pembangunan suatu daerah. juga ikut memainkan peranan penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan.

## **2. TINJAUAN TEORI**

### **2.1. Pengertian Pengendalian**

Pengendalian merupakan salah satu bagian dari manajemen. Pengendalian dilakukan dengan tujuan

supaya apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencapai target maupun tujuan yang ingin dicapai. Pengendalian memang merupakan salah satu tugas dari manager. Satu hal yang harus dipahami bahwa pengendalian dan pengawasan adalah berbeda karena pengawasan merupakan bagian dari pengendalian. Bila pengendalian dilakukan dengan disertai pelurusan (tindakan korektif), maka pengendalian adalah pemeriksaan di lapangan yang dilakukan pada periode tertentu secara berulang kali.

Kerangka teori sebagai landasan atau pedoman di dalam penelitian ini mempergunakan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian. Sehubungan dengan pernyataan tersebut peneliti mengemukakan beberapa pengertian mengenai pengendalian, seperti yang dikemukakan oleh Harold Koontz dalam Hasibuan (2008:241) sebagai berikut : *“Control is the measurement and correction of the performance of subordinates in order to make sure that enterprise objective and the plans devised to attain them* (Pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara).

Dari pendapat tersebut dapat dikemukakan pula ciri khas kegiatan pengendalian yang membedakan dari pengawasan yaitu bahwa pengendalian selalu dilakukan terhadap pekerjaan yang sedang berjalan hingga selesai.

Pendapat lain menurut Terry dalam Hasibuan (2006:242) pengertian pengendalian adalah, “Pengendalian

dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang harus dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.”

Demikian pula menurut Hasibuan (2007:22) pengertian pengendalian adalah sebagai berikut :

“Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan, agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan, diadakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana. Pengendalian karyawan meliputi kehadiran, kerjasama, pelaksanaan pekerjaan dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan.”

Berdasarkan uraian diatas, pengendalian merupakan suatu kegiatan mengendalikan para pegawai agar bekerja sesuai dengan rencana sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta dengan adanya pengendalian yang baik dapat mencapai kinerja pegawai yang diharapkan.

Pendapat Sujamto (2001: 11) pengendalian berkaitan erat dengan fungsi perencanaan dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi, yaitu:

1. Pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan.

2. Pengendalian baru dapat dilakukan jika ada rencana.
3. Pelaksanaan rencana akan baik, jika pengendalian dilakukan dengan baik.
4. Tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengendalian atau penilaian dilakukan.

Menurut Soejamto (2001: 27) yaitu: “ Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki serta sesuai pula dengan ketentuan kebijaksanaan yang berlaku”.

Selain itu, Soejamto (2001: 28). menjelaskan bahwa pengendalian berbeda dengan pengawasan, sebab pengawasan mempunyai arti segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan.

Pengertian lain menurut Lubis (2000, 98) bahwa: ”Pengendalian adalah suatu tindakan pengaturan dan pengarahan pelaksanaan dengan maksud agar suatu tujuan tertentu dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat dipahami bahwa pengendalian merupakan konsep yang sangat luas, berlaku untuk manusia, situasi dan organisasi. Dalam organisasi pengendalian meliputi berbagai proses perencanaan dan pengendalian. Bagian yang terpenting dalam proses ini adalah pengendalian manajemen, yang merupakan tindakan-tindakan yang

dilakukan manajemen mengerahkan orang, mesin-mesin dan fungsi-fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

## 2.2 Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efek yang artinya pengaruh yang ditimbulkan oleh sebab, akibat atau dampak. Dalam kamus Bahasa Indonesia efektif memiliki arti berhasil guna, ketepatan guna, atau menunjang tujuan. Definisi efektivitas dapat dilihat dari definisi asal kata maupun definisi oleh beberapa orang ahli. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi.

Menurut Siagian (2001 : 24) efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalakannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Efektivitas dalam kegiatan organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai. Sumaryadi (2005 : 105) berpendapat bahwa : organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut

dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas pada umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Faktor penentu Efektivitas, yaitu :Prosedural, Tujuan / Hasil, dan Monitoring / Evaluasi. Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan, maka bisa diambil kesimpulan bahwa efektivitas merupakan hasil dari suatu tindakan. Definisi dari kata efektif adalah pencapaian atau pemilihan tujuan yang tepat dari beberapa alternatif lainnya. Jadi, jika suatu kegiatan atau pekerjaan bisa selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif.

### 2.3 Pengertian Pemerintah

Pemerintah bisa kita artikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, atau lebih simpel lagi adalah orang atau sekelompok orang yang memberikan perintah. Namun secara keilmuan, Pemerintah diartikan dalam beberapa definisi, antara lain ada yang mendefinisikan sebagai lembaga atau badan public yang mempunyai fungsi dan tujuan Negara, ada pula yang mendefinisikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.

Menurut Ndraha (2011:6), Pemerintah adalah “organ yang berwenang memproses pelayanan publik

dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga Negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia, berhak menerima layanan civil tertentu dan pemerintah wajib melayakannya”.

Pendapat Wilson, diterjemahkan bahwa pemerintah dalam akhir uraiannya, adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud dan tujuan bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan.

Menurut Syafei (2005:23), pemerintah diartikan sebagai berikut :

*(‘Government in last analysis, is organized force, not necessarily or invariably organized armed force, but two of a few men, of many men, or of community prepared by organization to realize its own purpose with references to the common affairs or the community’).*

### 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode eksplanasi (*Explanatory Research*) yang dimana data informasi dapat dikumpulkan dari populasi, yang hasil datanyadikumpulkan dan dianalisis untuk dapat mengukur pengaruh dari satu variabel terhadap



variabel lainnya. Sumber data yang digunakan oleh peneliti terbagi atas 2 (dua) sumber yaitu Sumber Data Sekunder dan Sumber Data Primer. Sedangkan Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah sampel yang digunakan adalah sampel random sederhana (*Simple Random Sampling*). Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah Koefisien Korelasi Rank Spearman.

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk dapat mengetahui pengaruh Variabel Pengendalian Terhadap Efektivitas Izin Gangguan, akan

dilakukan perhitungan statistik dengan mempergunakan Software SPSS (*Statistical Product Service Solution*) Versi 21 yang mengambil data dari jawaban responden. Adapun langkah-langkah perhitungannya sebagai berikut :

##### 4.1 Perhitungan Korelasi Rank Spearman

Perhitungan Korelasi Rank Spearman dilakukan untuk mengetahui besar dan arah hubungan diantara variabel Pengendalian dengan variabel efektivitas izin gangguan. Adapun hasil perhitungan korelasi Rank Spearman dengan menggunakan SPSS V.21 adalah sebagai berikut :

**Tabel. 4.1.**  
**Perhitungan Korelasi Rank Spearman**  
**Correlations**

			PENGENDALIAN	EFEKTIVITAS IZIN GANGGUAN
Spearman's rho	PENGENDALIA	Correlation Coefficient	1,000	,790**
	N	Sig. (2-tailed)	.	,000
		N	48	48
EFEKTIVITAS IZIN GANGGUAN		Correlation Coefficient	,790**	1,000
		Sig. (2-tailed)	,000	.
		N	48	48

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Pengolahan SPSS, 2016

Dari tabel di atas terlihat, nilai koefisien korelasi Rank Spearman sebesar 0,790. Ini memperlihatkan bahwa hubungan atau korelasi diantara variabel Pengendalian dengan variabel efektivitas izin gangguan berada pada kriteria pengaruhnya kuat dan arahnya positif, artinya bahwa apabila Pengendalian dilakukan dengan baik maka Izin Gangguan akan efektif.

##### 4.2 Perhitungan Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui besarnya pengaruh akan dihitung nilai Koefisien Determinasi dengan hasil sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Koefisien Determinasi (KD)} &= r^2 \\ &\times 100\% \\ &= \\ &(0,790)^2 \times 100\% \end{aligned}$$

0,6241 atau 62,41 %

Ini memperlihatkan bahwa Pengaruh Variabel Pengendalian terhadap Variabel efektivitas izin gangguan adalah sebesar 62,41% dan sisanya sebesar 37,59% adalah faktor lain yang mempengaruhi Variabel efektivitas izin gangguan yang tidak diteliti.

### 4.3 Uji Hipotesis

Selanjutnya akan dilakukan pengujian hipotesis dengan hipotesis statistik sebagai berikut :

- $H_0$  :  $\rho \neq 0$  Tidak terdapat pengaruh Variabel Pengendalian Terhadap Efektivitas Izin Gangguan  
 $H_a$  :  $\rho = 0$  Terdapat pengaruh Variabel Pengendalian Terhadap Efektivitas Izin Gangguan

Hipotesis tersebut di atas akan dibuktikan dengan menghitung distribusi

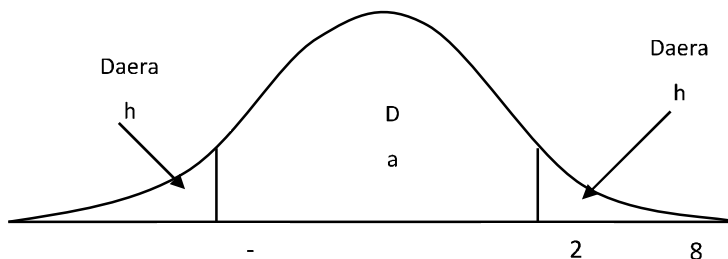
student (uji t) yang kemudian akan dibandingkan dengan t-tabel. Hasil perhitungan tersebut adalah sebagai berikut :

$$t = rs \sqrt{\frac{N-2}{1-rs^2}}$$

$$t = 0,790 \sqrt{\frac{48-2}{1-0,790^2}}$$

$$t = 8,7391$$

Hasil perhitungan tersebut akan dibandingkan dengan t-tabel, dimana dari hasil tabel distribusi t dengan tingkat ketelitian sebesar 0,05 didapatkan t-tabel adalah sebesar 2,0129. Ini menunjukkan bahwa nilai t hitung yaitu sebesar 8,7391 lebih besar daripada nilai t tabel yaitu sebesar 2,0129 yang dapat digambarkan dalam kurva distribusi normal t sebagai berikut :



Gambar. 4.1.

### Kurva Penerimaan $H_a$ dan Penolakan $H_0$

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa nilai t hitung sebesar 8,7391 berada pada daerah penerimaan  $H_a$ , artinya bahwa t tabel lebih besar dari t hitung, atau  $H_0$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Pengendalian Terhadap Efektivitas Izin Gangguan.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil perhitungan Analisis korelasi rank spearmen,

didapatkan hasil sebesar 0,790, yang menyatakan bahwa ada pengaruh antara Pengendalian dengan Efektivitas Izin Gangguan. yaitu setiap kenaikan satu-satuan nilai pada variabel Pengawasan (X) maka, variabel Pemilihan Kepala Desa (Y) akan naik sebesar 0,790

Berdasarkan hasil Analisis Korelasi pearson product moment, didapatkan hasil sebesar 0,790, nilai tersebut berada pada interval skor 0,60 – 0,799 memiliki hubungan yang kuat, dikarenakan korelasi atau hubungan



tersebut memiliki nilai positif yang menunjukkan searah, dapat disimpulkan bahwa semakin baik Pengendalian maka Efektivitas izin gangguan akan semakin meningkat.

Berdasarkan *Analisis Koefisien Determinasi*, didapatkan hasil sebesar 62,41%, nilai tersebut menunjukkan besarnya kontribusi Pengendalian terhadap Efektivitas Izin Gangguan, sedangkan sisanya 37,59% merupakan faktor lain diluar penelitian ini.

Berdasarkan hasil Pengujian Hipotesis, didapatkan hasil nilai  $T_{hitung}$  sebesar 8,7391, selanjutnya nilai  $T_{hitung}$  dibandingkan dengan nilai  $T_{tabel}$  yaitu sebesar 2,0096, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, dengan demikian dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengendalian Terhadap Efektivitas Izin Gangguan di Kecamatan Bojongsong Kabupaten Bandung.

## 5.2 Saran

Dari hasil penelitian mengenai Pengendalian Terhadap Efektivitas Izin Gangguan di Kecamatan Bojongsong Kabupaten Bandung, peneliti mengajukan beberapa saran, yaitu:

1. Disarankan kepada Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Bojongsong Kabupaten Bandung untuk lebih meningkatkan peran teknologi secara langsung terhadap para pengusaha di wilayah Kecamatan Baru). Bojongsong Kabupaten Bandung.
2. Disarankan kepada Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Bojongsong Kabupaten Bandung lebih disiplin dalam menghukum atau pelanggaran pekerjaan dilapangan untuk meminimalisir penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha di wilayah Kecamatan Bojongsong Kabupaten Bandung.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*
- Praktekedisi V revisi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Alih Bahasa oleh Samoedra Wibawa, Diah Asitadani, Agus Heruanto Adna, dan Erwan Agus Purwanto). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Handoko, T. Hani 2003, *Manajemen. Edisi Kedua. Cetakan Kedelapanbelas*. Yogyakarta: BPFE-YogyakartaHarahap 2001
- Hasibuan SP, Malayu. 2006. *Manajemen (dasar, pengertian, dan masalah)*. Jakarta : Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_, 2007. *Manajemen (dasar, pengertian, dan masalah)*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Kerlinger, F. N. 1998. *Azas-azas Penelitian Behavioral* (terjemahan) Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Lubis, Muchtar. 2000. *Etika Pegawai Negeri*. Jakarta: Yayasan Obor
- Nidrahenti, I. 2003. *Manajemen Teknologi* (Ilmu Wilayah Kecamatan Baru). Jakarta: PT. Rineke Cipta.
- \_\_\_\_\_, 2004. *Metode Ilmu Penalaran*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Rahmat, Cahatim. 2004. *Metode Penelitian komunikasi*. Bandung: remaja Rosdakarya.
- Ruseffendi, ET. 1994. *Dasar-dasar Penelitian Pendidikan dan Bidang Non Eksakta*, Semarang: IKIP Semarang Press.

- Saefudin, Azwar, 1997. *Reabilitas dan Validitas*. Yogyakarta:PustakaPelajar
- Siagian P. Sondang, 2001, *Pengantar Manajemen*, edisi pertama, cetakan pertama, Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta
- Sevilla, Consvelo,G.,Et.all. 1993. *PengantarMetodepenelitian*. Penerjemah : AlimudahTuwu : SKS : PNI Universitas Indonesia..
- Siegel, Sidney, 1986. *Statistic Non Parametik*, Jakarta : Gramedia
- Singarimbun. 1995. *MetodePenelitian survey*. Jakarta: LP3ES.
- Suadi, Arief. 2001. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Kamus Sosiologi*. Jakarta : Rajawali Press.
- Sugiyono. 2003.*Statistika untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- ....., 2006*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta
- Sujamto, 2001. *BeberapaPengertian di BidangPengawasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*.Jakarta : PN Citra Utama.
- Wardhana, Wisnu Arya. 2004. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta: Andi.
- Wirjana, Bernardine R. 2007. *Mencapai Manajemen Berkualitas*. Yogyakarta: Andi.

#### **Dokumen dan Sumber Lainnya:**

- Republik Indonesia. 2015. SebagaiPerubahanAtasUndang-undangNomor 23 Tahun 2014 TentangPemerintahan Daerah. Jakarta: Menteri Dalam Negeri RI.
- Propinsi Jawa Barat. 2012. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2011 TentangRetribusiIzinGangguan.
- .....
- 2011Peraturan Bupati Bandung No 60 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat